

Oktober 2019

Ringkasan Kebijakan: Industri Kelapa Sawit, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan¹

Latar Belakang

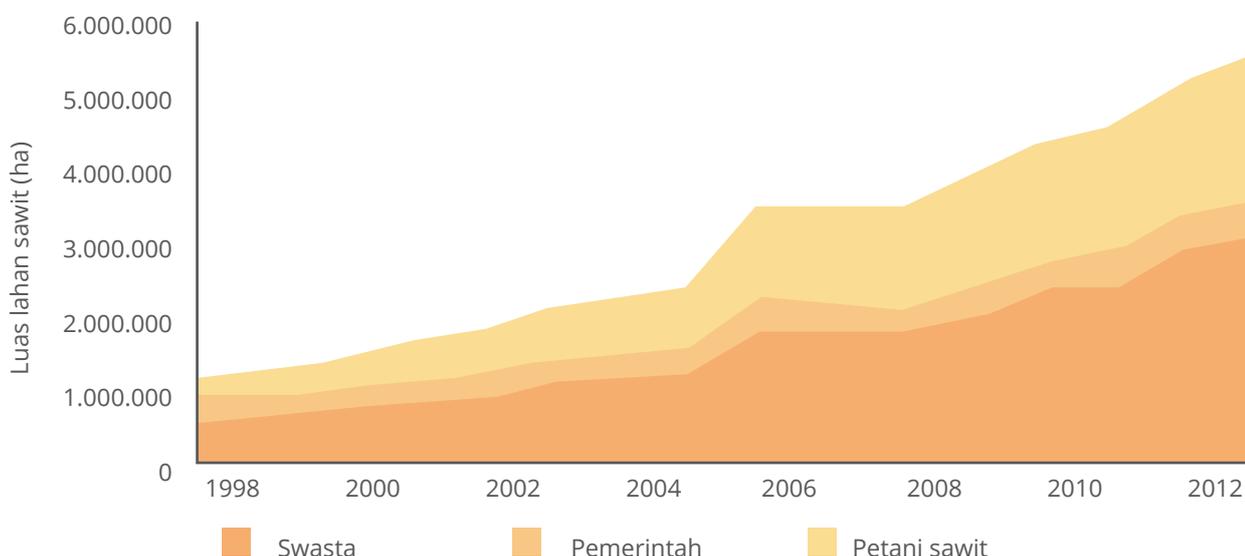
Industri kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, baik dari sisi luas lahan maupun total produksi. Selama periode 1990-2017, lahan perkebunan kelapa sawit melonjak tiga kali lipat. Hal ini di ikuti dengan kemampuan produksi kelapa sawit meningkat lebih dari 300%. Sejak tahun 2008, Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Industri kelapa sawit berkembang cukup pesat dengan jutaan penduduk yang hidup pada sektor ini. Salah satu karakteristik industri ini adalah padat karya dan memungkinkan berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, sektor ini merupakan salah satu kontributor penurunan

kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, total ekspor sektor ini diperkirakan sebesar Rp 240 triliun dan menjadi penyumbang terbesar pemasukan devisa.

Di sisi lain, industri kelapa sawit berhubungan pada lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana 4,2 juta lapangan pekerjaan secara langsung melalui kepemilikan perkebunan sawit dan 12 juta lapangan pekerjaan tidak langsung. Dalam industri kelapa sawit, peran petani sawit cukup besar dalam perluasan industri. Saat ini hampir setengah dari seluruh lahan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh petani dalam skala kecil (perkebunan rakyat). Angka ini bahkan belum mengikutsertakan petani informal.

Gambar 1 Pertumbuhan Perluasan Lahan Kelapa Sawit, 1998-2012



Sumber: Hasil Analisis, 2016

¹ Di adopsi dari kajian Dampak Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit Terhadap Kemiskinan Multidimensi dan Ketimpangan, 2016.

Pada sisi lain, industri kelapa sawit juga berperan dalam menciptakan ketahanan energi nasional. Pemerintah saat ini menekankan peningkatan penggunaan bio energi melalui kebijakan B20 untuk non public service obligation (PSO) pada produk bio-solar. Diperkirakan, bio-solar masuk dalam bauran energi dengan kapasitas 3 juta kilo liter. Hal ini penting ditengah meningkatnya harga minyak dunia dan dapat menghemat cadangan devisa sekitar Rp 14,83 triliun.

Tujuan

Dampak perluasan industri kelapa sawit terhadap kemiskinan dan faktor sosio-ekonomi hingga saat ini masih cukup terbatas. Tanpa bukti empiris yang kuat, sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat bersikeras menuntut kebijakan pemerintah dan partisipasi publik untuk memboikot konsumsi produk kelapa sawit dengan alasan merusak lingkungan. Kajian ini merupakan studi pertama berbasis data untuk mengungkap dampak perluasan industri kelapa sawit terhadap kemiskinan dan aspek sosio-ekonomi di Indonesia.

Industri Kelapa Sawit Berkontribusi Pada Penurunan Kemiskinan Dan Ketimpangan

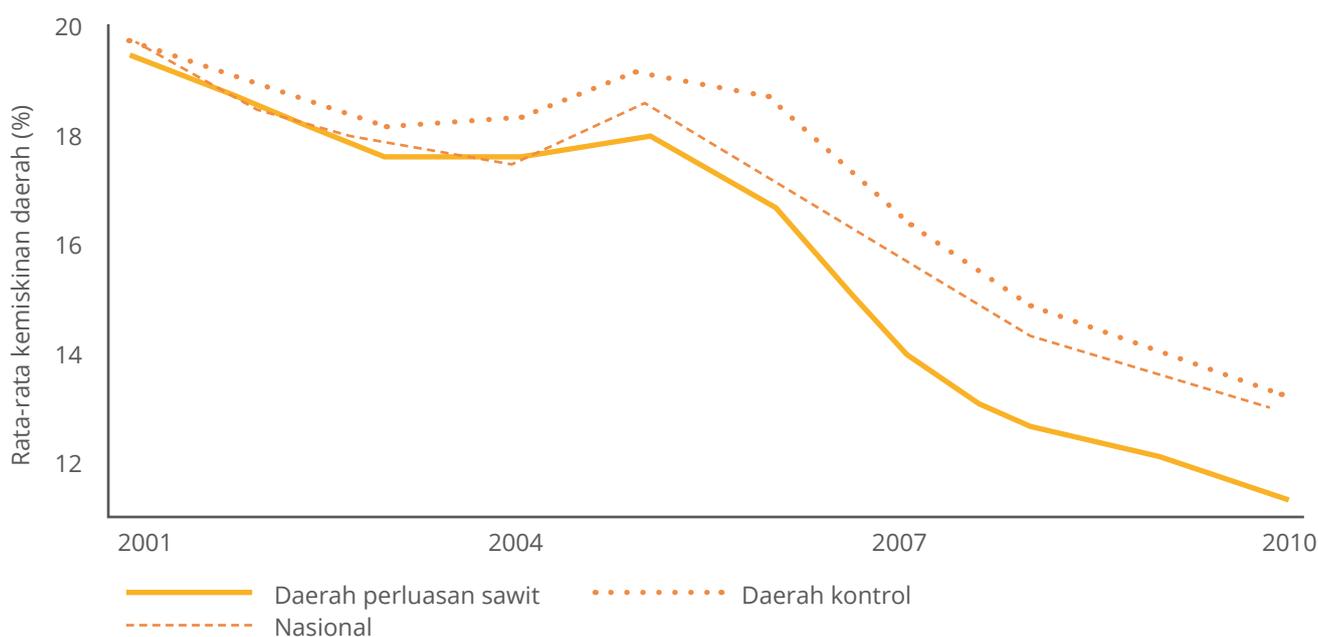
Kajian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur kontribusi perluasan industri kelapa sawit terhadap penurunan tingkat kemiskinan sejak tahun

2000. Studi ini membandingkan tren angka kemiskinan antara daerah dengan perluasan area kelapa sawit dan daerah yang tidak melakukan atau melakukan lebih sedikit perluasan lahan kelapa sawit. Dengan menganalisa rasio lahan sawit terhadap lahan total di setiap daerah, studi ini membandingkan dampak penggunaan lahan oleh industri kelapa sawit dengan penggunaan lahan lainnya.

Unit analisa dari studi ini adalah tingkat kabupaten/kota. Namun kemiskinan provinsi, tingkat konsumsi rumah tangga pertanian, tingkat konsumsi rumah tangga 20% terbawah, kualitas jalan, akses listrik, dan produksi sektoral secara berkala juga dilakukan untuk seluruh petani maupun pekerja industri sawit. Data produksi kelapa sawit diperoleh dari statistik resmi Kementerian Pertanian. Sementara data kemiskinan diperoleh dari hasil perhitungan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Perluasan industri kelapa sawit berkontribusi terhadap upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya di pedesaan. Daerah dengan proporsi lahan kelapa sawit yang lebih besar mengalami penurunan kemiskinan yang lebih pesat dibandingkan dengan daerah lainnya. Perluasan lahan kelapa sawit menunjukkan efektifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan lahan oleh sektor lainnya.

Gambar 2 Daerah perluasan sawit mengalami penurunan kemiskinan yang lebih pesat dibanding daerah lain



Gambar 3 Pekebun rakyat memiliki peran yang signifikan di sektor minyak sawit Indonesia



Sumber: Kementerian Pertanian, 2018

Konsumsi rumah tangga miskin dan rumah tangga pertanian meningkat lebih signifikan di daerah perluasan kelapa sawit. Hal ini mengindikasikan lebih tingginya pendapatan pekerja di sektor kelapa sawit yang secara umum juga mengangkat upah pekerja di sektor pertanian. Menurunnya tingkat kemiskinan kabupaten/kota dan provinsi serta meningkatnya pendapatan pekerja di sektor pertanian dan rumah tangga 20% terbawah menunjukkan bahwa dampak positif industri kelapa sawit juga menyebar kepada kelompok miskin di luar sektor kelapa sawit.

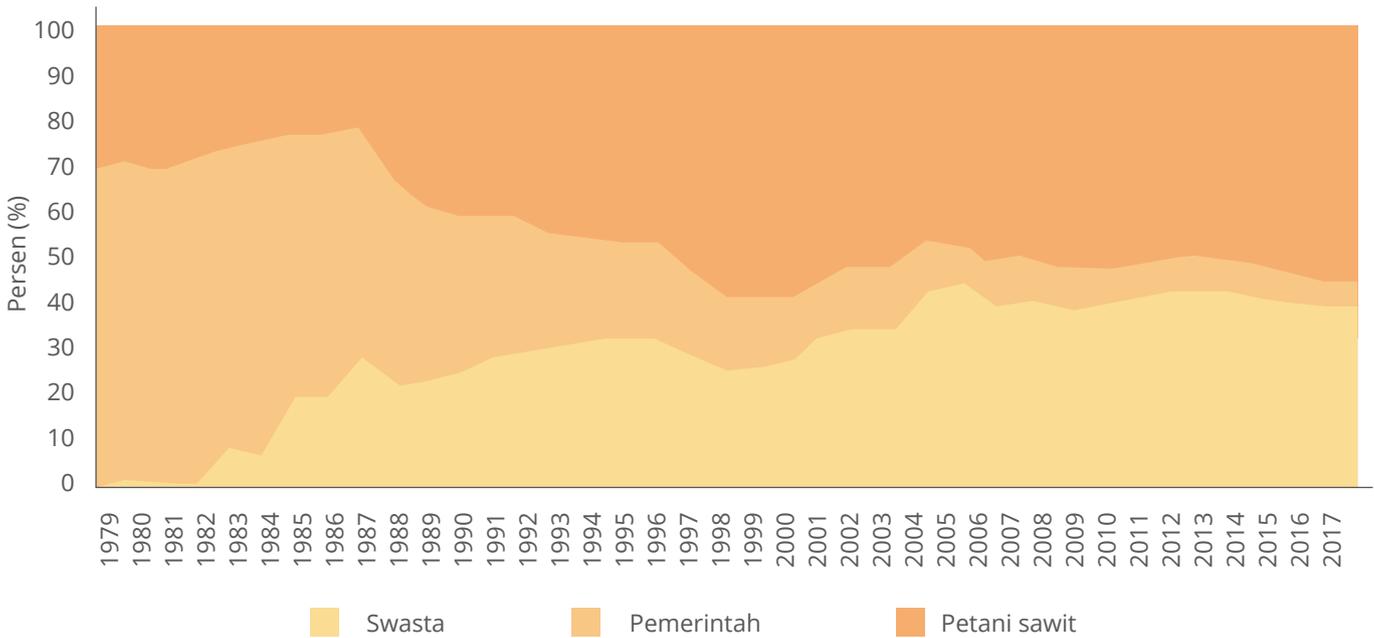
Nilai produksi pertanian, perindustrian, maupun nilai produksi total meningkat lebih tinggi di daerah dengan perluasan lahan kelapa sawit. Desa di daerah ini juga memiliki kecenderungan untuk mendapat perbaikan jalan dan akses listrik. Tidak seperti jenis tanaman lainnya, kelapa sawit menuntut pengolahan yang cepat. Tuntutan infrastruktur dari industri kelapa sawit mendorong perbaikan infrastruktur untuk kepentingan industri dan juga kepentingan desa secara umum.

Sekitar 1,3 juta penduduk pedesaan di Indonesia berhasil keluar dari kemiskinan secara penuh melalui pertumbuhan industri kelapa sawit yang dimulai di tahun

2000. Sementara itu, sekitar 10 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan sebagian besar dikarenakan oleh melonjaknya industri kelapa sawit. Hal ini merupakan pencapaian besar mengingat pada periode yang sama, penurunan kemiskinan nasional melambat sementara cakupan program pemberantasan kemiskinan meningkat.

Kajian dampak industri kelapa sawit terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah. Pertama, hasil kajian tersebut menjadi input dalam rangka diplomasi pemerintah untuk kembali membuka pasar Uni Eropa. Hal ini merupakan tindak lanjut dan antisipasi pemerintah dari rencana Uni Eropa untuk memberlakukan pemblokiran biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) pada 2021. Kedua, menjadi salah satu rujukan dalam merumuskan proyeksi produksi dan konsumsi kelapa sawit yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketiga, menjadi salah satu pertimbangan dalam ekstensifikasi kebijakan bio-solar (B20) *non Public Service Obligation* (PSO) serta rencana akselerasinya

Gambar 4 Proporsi Perkebunan Rakyat, BUMN dan Swasta, 1979-2017



Sumber: BPS, 2018

Gambar 5 Industri Kelapa Sawit dan Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Sumber: TNP2K, 2018 "Indonesia Palm Oil Sector Contribution to Reduce Poverty and Inequality"

Implikasi Kebijakan

Memperkuat *value chain* produk-produk kelapa sawit dan turunannya. Peningkatan industri kelapa sawit sejak tahun 2000 berkontribusi besar dalam penurunan tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, menjaga dan memperkuat rantai nilai tanaman pangan bernilai tinggi yang berkelanjutan dan inklusif menjadi aspek penting dalam strategi pemberantasan kemiskinan, khususnya terkait dengan industri kelapa sawit.

Meningkatkan produktivitas kelapa sawit, khususnya perkebunan rakyat. Petani kelapa sawit memegang peranan penting dalam perluasan industri kelapa sawit, namun tingkat produktivitas kelompok tersebut jauh lebih rendah dibandingkan produksi sektor swasta. Dengan moratorium perluasan lahan sawit, target produksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dipenuhi dengan meningkatkan produktivitas kelompok tersebut. Kebijakan yang mendukung petani untuk meningkatkan produksi melalui dukungan permodalan dan intensifikasi dengan cara bertanam yang lebih baik, penggantian pohon tidak produktif dengan kualitas yang lebih baik, dan kebebasan untuk beralih dari tanaman tidak produktif ke kelapa sawit dalam batas wajar merupakan aspek kebijakan yang perlu dikembangkan lebih jauh.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dampak dari aktivitas perkebunan kelapa sawit. Petani sawit yang sukses dapat secara aktif berpartisipasi dan mendorong pembangunan daerah, khususnya di wilayah perdesaan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka ruang yang cukup untuk meningkatkan intensifikasi perkebunan sawit, khususnya di perdesaan

melalui model pemberdayaan petani dengan melibatkan penuh penyuluh dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan pengetahuan petani. Selain itu, aturan tersebut juga dapat digunakan sebagai payung pengawasan pengelolaan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Memperluas akses permodalan dan jaminan kepemilikan perkebunan. Bukti kepemilikan tanah yang tidak dimiliki oleh sebagian besar petani sawit membatasi akses mereka pada pembiayaan usaha, program bantuan pemerintah maupun swasta, dan posisi dalam rantai nilai industri kelapa sawit. Kepemilikan tanah yang resmi menjadi sangat penting bagi petani sawit yang akan menanggung beban terbesar dalam tantangan perencanaan tata ruang di sektor kelapa sawit saat ini. Oleh karena itu, peran aktif BPN dalam melakukan sertifikasi lahan perkebunan sawit memegang peranan penting bagi perluasan akses petani pada aspek permodalan.

Daftar Pustaka

TNP2K, 2018, *"Indonesian Palm Oil Sector Contribution to Reduce Poverty and Inequality"*, Jakarta. (tidak dipublikasikan)

Bustami, Dono, 2018, *"Indonesian Palm Oil Outlook 2018 and Beyond"*, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Jakarta.

Ryan B. Edwards, 2016, *"Dampak Pertumbuhan Industri Kelapa Sawit Terhadap Kemiskinan Multidimensi dan Ketimpangan"*, Pusat Studi Ketahanan Pangan dan Lingkungan, Universitas Stanford dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

